

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia adalah salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks dan topik kemiskinan ini masih relevan untuk didiskusikan dalam sebuah forum internasional maupun nasional, meskipun kemiskinan merupakan hal yang selalu muncul dalam suatu negara sejak zaman dulu dan belum juga terselesaikan hingga sampai saat ini. Seperti yang kita pahami bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang masih bisa kita sangkut pautkan dengan berbagai hal tentang keadaan hidup. Kondisi kemiskinan telah berkembang secara ekonomi didalam suatu negara dan menjadi salah satu indikator yang dipakai dalam mengukur tingkat progres kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan demikian, jika tingkat kemiskinan dimasyarakat telah menurun maka bisa disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu negara itu meningkat (Wiguna, 2013).

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang lumayan banyak dan karena itu kemiskinan menjadi hal yang susah untuk dihindari negara Indonesia. Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang dapat berupa pengangguran dan ketimpangan sosial yang masih sering terjadi di Negara Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan. kemiskinan disini bisa diartikan dengan seseorang atau keluarga yang sulit untuk mengakses kebutuhan

hidupnya yang bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan yang mereka peroleh (Amaliah, 2015).

Menurut (Prawoto, 2009) program untuk mengurangi kemiskinan sudah berlangsung lama di Indonesia. Namun, perubahan yang signifikan belum ada dalam pengentasan kemiskinan, termasuk dalam aspek kenaikan pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi justru trade-off dan hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu serta membuat jurang kesenjangan. Kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menekankan kepada pertumbuhan ekonomi harus bisa dipastikan diserap oleh seluruh lapisan masyarakat seperti tertuang dalam firman Allah pada Surat Ad-Dzariyaat ayat 19:

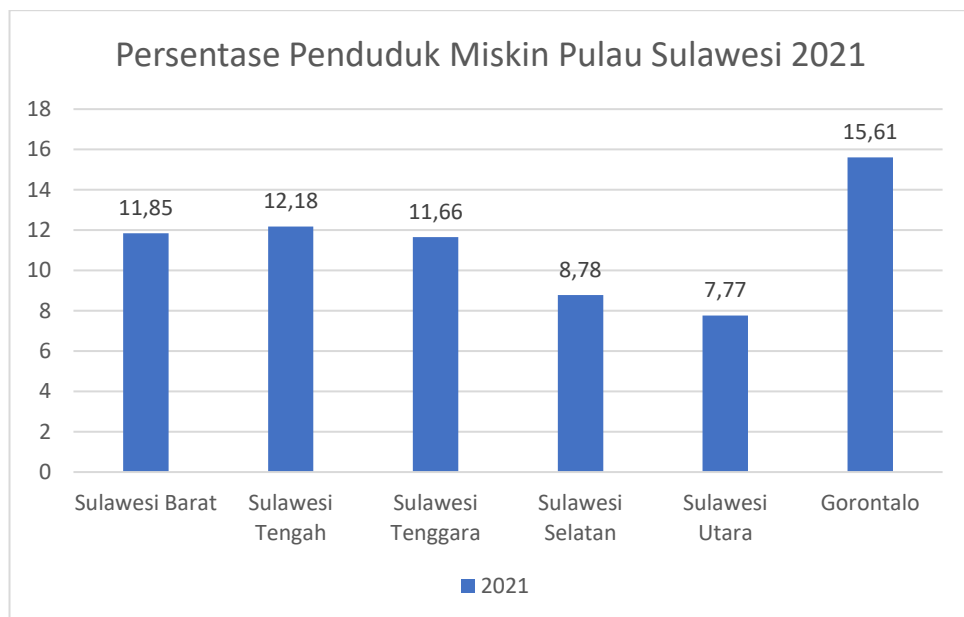
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”* (QS 51:19).

Tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja menjadi masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, peran negara dalam menanggulangnya menjadi salah satu tugas utama. Alokasi dana APBN/APBD untuk program penanggulangan kemiskinan bisa dikatakan berhasil bila jumlah dan proporsi penduduk miskin berkurang. Meskipun telah dijelaskan bahwa perlunya pemantauan dan peninjauan terus-menerus terhadap langkah-langkah anti-kemiskinan, terutama dalam persiapan dan implementasi rencana dan program anti-kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Kemiskinan

masih menjadi masalah yang cukup serius di beberapa wilayah Indonesia, terutama di beberapa provinsi di Sulawesi (Mahmud, 2020).

Secara administratif pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Tingkat kemiskinan di beberapa daerah ini lumayan tinggi dan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian. Dalam data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi bisa di representasikan pada grafik berikut :



GAMBAR 1.1

Persentase Penduduk Miskin Pulau Sulawesi 2021

Sumber: (BPS 2022).

Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa secara rata-rata kemiskinan di pulau Sulawesi cukup lumaayan tinggi. Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah yang

mempunyai persentasi penduduk miskin paling sedikit jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Sulawesi, yaitu hanya mencapai angka sebesar 7.77 persen. Sedangkan Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu sebesar 15.61 persen. Kemudian pada provinsi Sulawesi tengah dengan angka kemiskinan sebesar 12.18 persen dan provinsi Sulawesi Barat sebesar 11.85 persen. Selanjutnya diikuti oleh provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 11.66 persen. Kemudian pada provinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar 8,78 persen.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah dalam pengembangan ekonomi di Indonesia dan sampai saat ini masalah kemiskinan ini belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat ini kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan hanya sebatas ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup, tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan sumber daya alam.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah dan salah satunya kesehatan. Kemiskinan dan kesehatan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, Kesehatan dianggap sebagai salah satu aspek yang mempunyai tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat luas. Bahkan sudah beberapa cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat seperti dengan mengadakan pelayanan kesehatan gratis, adanya peningkatan pencegahan serta

penanggulangan penyakit menular, meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga kesehatan, serta penjaminan mutu. Dengan adanya perbaikan kesehatan seperti ini diharapkan aspek kesehatan pada masyarakat bisa efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada di masyarakat (Astuti 2015).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Dengan jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat dan pertumbuhan lapangan kerja yang tidak terlalu cepat berdampak dengan semakin banyak pengangguran di negara berkembang dan populasi penduduk di daerah kota semakin meningkat setiap tahunnya sehingga menimbulkan persaingan yang cukup ketat pada masyarakat.

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Baik negara berkembang maupun negara maju, pengangguran merupakan suatu keadaan yang keberadaannya tidak terelakkan. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan sebab pengangguran sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Amalia, 2012).

Faktor lain yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan suatu daerah yang mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan suatu daerah mempunyai nilai IPM yang tinggi yang biasanya diikuti oleh kualitas hidup masyarakat juga tinggi. Dengan kata lain,

apabila nilai IPM suatu daerah tinggi, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut seharusnya rendah. Terdapat empat komponen dalam indeks pembangunan manusia, yaitu bidang kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, rata-rata besarnya pengeluaran perkapita untuk melihat kemampuan daya beli masyarakat yang dilihat dari pendekatan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang pengembangan hidup layak (Alhudhori, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah penting di Provinsi Sulawesi Tenggara. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/ kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KESEHATAN, PENGANGGURAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017-2021”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini cuma terbatas mengenai pembahasan yang akan dilakukan pada variabel-variabel yang menjadi topik dan objek penelitian ini, seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran serta indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 hingga tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, dalam rangka untuk memfokuskan pembahasan pada penelitian ini, penulis meringkaskan beberapa konteks pembahasan yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021

D. Tujuan Penelitian

Dari adanya pembatasan serta perumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai capaian pada pembahasan penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021
2. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021
3. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini cukup bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh kesehatan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2017-2021.
2. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya kepada berbagai pihak yang membutuhkan, dan untuk penelitian berikutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas atau dikaji secara seksama.
3. Dapat menjadi masukan kepada badan pengurus daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.